



Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG's Di Kecamatan Kaliwungu Selatan

Ika Rini Harmonis*¹, Abdul Malik²

¹Pendidikan Luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

²Pendidikan Luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: ikariniharmonis23@students.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted July 12, 2024

Available online August 01, 2024

Kata Kunci:

Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan, SDGs

Keywords:

Role of Companion, Family Hope Program, SDGs



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana tidak adanya hal-hal yang secara umum diklaim, misalnya makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal tersebut berkaitan erat dengan kepuasan pribadi. Salah satu upaya otoritas publik untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk PKH dan dalam siklus peruntukannya terdapat beberapa kolaborator PKH yang memberikan inspirasi atau mengarahkan cara yang paling umum dalam mengedarkan panduan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Di Kota Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, pekerjaan teman-teman sangat mempengaruhi wilayah penerima bantuan yang kondisinya berangsur-angsur membaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menguraikan dampak dari upaya pencapaian beberapa program SDGs diantaranya yang sudah dilaksanakan Desa Sukomulyo yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang berkualitas, dan desa berkesetaraan gender di Kota Sukomulyo, Kaliwungu Selatan. Kajian ini diarahkan menggunakan strategi eksplorasi memukau dengan metodologi subjektif. Pengumpulan informasi dalam pemeriksaan kualitatif ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

pendamping sangat berpengaruh pada masyarakat dalam mengatur keuangan juga menerima informasi berupa pengetahuan juga pelatihan yang diadakan pendamping PKH setiap pertemuannya, dimana berupa motivasi dan memberikan fasilitas kepada masyarakat penerima manfaat begitu diperhatikan satu persatu sampai masyarakat menyadari dirinya mampu dan mengubah keadaannya lebih baik lagi. Mulai dari ibu hamil, lansia, hingga anak yang sedang menjalankan sekolahnya.

ABSTRACT

Poverty can be described as a situation where there is a lack of things that are generally claimed, for example food, clothing, shelter and drinking water, these things are closely related to personal satisfaction. One of the public authorities' efforts to overcome poverty is by providing assistance in the form of PKH and in the allocation cycle there are several PKH collaborators who provide inspiration or direct the most common ways to circulate guidelines and utilize them as needed. In Sukomulyo City, South Kaliwungu District, the work of friends has greatly influenced the areas receiving aid, whose conditions are gradually improving. The aim of this research is to describe and explain the impact of efforts to achieve several SDGs programs, including those that have been implemented in Sukomulyo Village, namely no poverty, no hunger, quality education, and a gender equal village in Sukomulyo City, South Kaliwungu. This study was directed using a fascinating exploration strategy with subjective methodology. Collecting information in this qualitative examination uses observation and in-depth interviews. The results of the research show that the role of the companion is very influential on the community in managing finances and also receiving information in the form of knowledge and training provided by the PKH

companion at each meeting, in the form of motivation and providing facilities to the beneficiary community so that they are paid attention to one by one until the community realizes that they are capable and changes their situation for the better. good again. Starting from pregnant women, and the elderly to children who are attending school.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ekonomi yang belum memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah memerlukan bantuan masyarakat tuntut meneliti dan mencari jawaban atas masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi Kurangnya kebutuhan pokok termasuk pangan, sandang, perumahan, dan air minum yang semuanya berkaitan langsung dengan taraf hidup seseorang adalah apa yang biasa disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah lain yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia, oleh karena itu meskipun dampaknya berbeda-beda di setiap negara, kemiskinan telah menjadi masalah universal. suatu negara dianggap miskin jika pertumbuhan penduduknya sangat pesat (lebih dari 2% per tahun), sebagian besar tenaga kerjanya bekerja di bidang pertanian, dan terjebak dalam siklus kemiskinan ekstrem. (Kunarjo, 2002).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik makanan maupun non-makanan, dengan menggunakan biaya. BPS menetapkan sejumlah standar kemiskinan, antara lain sebagai berikut, yang didasarkan pada pengeluaran harian per orang: a. Tidak Miskin: Individu dengan pengeluaran bulanan di atas Rp 350.610. b. Hampir miskin, didefinisikan sebagai individu yang pengeluaran bulanan per orangnya berkisar antara Rp 280.488 hingga Rp 350.610, atau sekitar Rp 9.350 hingga Rp 11.687 per orang per hari. c. Hampir miskin, didefinisikan sebagai individu yang pengeluaran bulannya berkisar antara Rp 233.740 hingga Rp 280.488 atau antara Rp 7.780 hingga Rp 9.350 per orang per hari. d. Masyarakat miskin adalah individu yang pengeluaran harian per orangnya sebesar Rp 7.780 atau kurang atau yang pendapatan per bulannya per kepala sebesar Rp 233.740 atau kurang. e. Sangat miskin, tanpa batasan pengeluaran harian yang ditetapkan untuk setiap individu. Jumlah pastinya tidak diketahui. Menurut (Dr. Suwandi, 2014) Kemiskinan bermula dari dua faktor. Pertama, sumber daya manusia yang terbatas, termasuk keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan, serta lokasi fisik yang terisolasi dan sulit diakses merupakan penyebab utama kemiskinan. Kedua, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan yaitu pengabaian wilayah tertentu, kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, serta kurangnya penekanan pada produk lokal dan kurang memperhatikan produk masyarakat maupun usaha yang berskala kecil.

Kemiskinan dipedesaan cenderung meningkat sebagai akibat permasalahan yang kompleks. Kemiskinan didesa terjadi sebagai imbas dari pembangunan yang tidak merata, akses terhadap pendidikan yang sulit dan berakibat pada minimnya kemahiran dan ini menjadi penyebab banyaknya pengangguran didesa. Lapangan kerja yang minim tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, ditambah banyaknya lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian telah beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Kemiskinan di kota tentu berbeda dengan kemiskinan

yang terjadi di desa, kemiskinan di kota lebih disebabkan adanya faktor ekonomi dan kebijakan (Ridena, 2021).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan menjadi landasan salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan (PKH). Tujuan program PKH adalah membantu keluarga miskin menjadi lebih terencana dan terarah dengan menurunkan beban keuangan dan meningkatkan pendapatan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. (Nandini dkk., 2022).

Berdasarkan keadaan yang sangat nyata, pemerintah Indonesia memiliki empat tujuan dalam mengembangkan program PKH, yaitu sebagai berikut: Pertama, situasi yang jauh lebih buruk terjadi di beberapa kabupaten, dengan perkiraan terdapat 6,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memperoleh pendapatan rata-rata hanya Rp 130.000,00 per bulan. Kedua, tingginya kasus stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Anak-anak di Indonesia masih memiliki berat badan di bawah batas normal, yang menunjukkan bahwa negara ini masih mempunyai tingkat kekurangan gizi yang signifikan di kalangan generasi muda. Selain itu, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang masih mengonsumsi makanan yang sangat rendah gizinya. Ketiga, Indonesia masih mempunyai angka kematian ibu yang tinggi. Untuk setiap 100.000 kelahiran, sekitar 130 ibu meninggal setelah melahirkan, angka ini yang tertinggi di ASEAN. Program bantuan nutrisi perlu ditekankan seperti Negara Amerika Serikat memberikan bantuan nutrisi terbesar di negara itu untuk populasi berpenghasilan rendah. (Lorts dkk., 2019).

Penyebab utama terjadinya kondisi ini adalah: (1) ibu hamil yang berasal dari kalangan berpendapatan rendah tidak rutin memeriksakan kesehatan sebelum melahirkan, (2) perempuan tersebut ingin atau mampu membayar layanan persalinan yang disediakan oleh dukun bayi. (3) banyaknya anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) yang diwajibkan oleh undang-undang. Meskipun ada deklarasi wajib belajar secara nasional, angka partisipasi anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah di bawah 45% untuk sekolah dasar dan kurang dari 20% untuk sekolah menengah pertama. (Elisah, 2022).

Menurut (Herdiyanti & Akbar, 2020) Orang tua merupakan lembaga sosial yang bertugas melakukan penanaman nilai-nilai dan norma-norma kepada anak-anaknya, sehingga menjadikannya seorang yang baik dan orang yang unggul dalam masyarakat dan Pendidikan itu sangat penting. Orang tua sebagai aktor yang memegang peranan terpenting dalam hal ini pendidikan, harus memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya.

Beberapa mekanisme utama yang digunakan Negara kesejahteraan untuk mendukung pertumbuhan adalah pembentukan sumber daya manusia berkualitas tinggi, yang meningkatkan output dan produktivitas melalui sistem pendidikan dan kesehatan perluasan dan stabilisasi permintaan konsumen. (Buchs, 2021) Setelah melihat kondisi tersebut, Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama-sama memperkenalkan program PKH pada tahun 2006.

Meskipun pada saat itu program PKH masih diujicobakan di 48 kabupaten/kota di tujuh provinsi, namun program ini pertama kali diluncurkan. Langkah signifikan menuju penerapannya secara nasional sesuai aturan.

Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 592/SK/PFM.PPK PAN.2/12/2017, pendamping sosial idealnya mengawal pelaksanaan pendaftaran KKS hingga penyaluran bansos kepada KPM serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan bantuan pangan agar masyarakat KPM dapat mengelola dana bantuan sosial dengan baik dan tepat. Pada akhirnya pengelolaan yang tepat dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan KPM. (Nandini dkk., 2022).

Menurut (Hubaib, 2020) Ada lima indikator yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan pendidikan untuk pemerataan (1) Kondisi kondisi sosial ekonomi dan perekonomian, politik akan saling berkaitan dengan ruang lingkungannya belajar. Masukan dari akademisi menyatakan komposisi terjemahannya sangat rumit (2) Pengaruh yang menyebabkan nilai penelitian sebagai secara keseluruhan, merupakan ruang lingkup dari proses-proses utama dalam proses pendidikan dan sosial ekonomi akan menjadi nilai hasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan disiplin dimiliki (3) Pada tingkat lokal, regional, regional, dan nasional perlu adanya dukungan dari masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi masyarakat, local jaringan aksi, wirausaha sosial, amal landasan dan pembangunan secara terpadu dan mengidentifikasi contoh praktik terbaik dan social pembelajaran yang meliputi faktor keberhasilan, pelaksanaan hambatan dan tantangan untuk meningkatkan sosial yang efektif dan intervensi ekonomi, (4). Pendekatan untuk mengukur efektivitas dalam proses melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan keluar dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, wilayah dan pada tingkat perdesaan dan perkotaan, sehingga merata pemerataan pendidikan, perekonomian kerakyatan. (5) Prinsip teori sosial menunjukkan nilai proses universal dalam penyajiannya. Pendidikan itu, ekonomi dan sosial adalah hak seluruh umat manusia, tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasi nilai unit hubungan dalam kondisi lingkungan social dan situasi. Dan tepatnya pendidikan, sosial dan komunitas ekonomi itu sendiri membantu membangun dan mencipta.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan proses strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. (Mulyono, 2020). Dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan terdiri dari faktor pendorong yaitu kebutuhan ekonomi, kesadaran masyarakat melestarikan potensi lokal unggulan, dan ketertarikan dalam kegiatan sesuai dengan kemampuannya. (Lestari & Suminar, 2020). Semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin banyak pembelajaran dan perolehan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan sosial. (Kibukho, 2021). Peran Pendamping PKH juga diharapkan dapat mendukung upaya tercapainya tujuan Pembangunan Berkela

njutan (SDGs). Inisiatif ini dapat membantu memenuhi setidaknya 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peran ini mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku yang diberikan masyarakat kepada setiap individu yang menduduki jabatan tertentu. (Jusrianto, 2020).

Dalam hal ini, Secara mental, mengeksplorasi titik temu antara SDG 4, yang berkomitmen untuk memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas dan adil, dan SDG 17, yang mendorong kemitraan global untuk mencapai SDGs. (Menashy & Zakharia, 2023) Pemantauan lingkungan berperan penting dalam menginformasikan pengembangan kebijakan dan sistem tata kelola berbasis bukti yang bertujuan untuk mencapai SDG. Dengan menyediakan data penting mengenai tren dan tekanan lingkungan, upaya pemantauan merupakan alat dasar bagi pembuat kebijakan, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan dan melacak kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. (Nakhle dkk., 2024).

Menurut (Burhanuddin dkk., 2023). Penerapan zona integritas sangat perlu diterapkan karena sangat berpengaruh jalannya pelatihan terlihat enam kriteria, yakni manajemen perubahan, penerapan tata kelola, penataan SDM sistem manajemen, penguatan kinerja akuntabilitas, memperketat pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan public telah dilakukan keluar secara benar dan sesuai dengan yang berlaku prosedur atau pun mekanisme.

PKH telah berhasil mencapai SDGs berikut: Pertama, kemiskinan harus diberantas. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim bahwa peningkatan bantuan sosial tunai sebesar 87,6% menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan di Indonesia antara tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2017, terdapat enam juta penerima manfaat PKH, dan pada tahun 2018, terdapat 10 orang juta. Kedua, untuk mengentaskan kelaparan, PKH mendorong peserta untuk sering mengunjungi layanan kesehatan dan mengelola kecukupan gizinya. Selain itu, bantuan PKH dilengkapi dengan sejumlah layanan tambahan, salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupaya memberikan gizi seimbang kepada pengguna bantuan dan meningkatkan ketahanan pangannya. Ketiga, memiliki kesehatan yang baik dan kesejahteraan, adanya PKH telah menyelamatkan ibu hamil yang terkendala ekonomi, karena mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan secara gratis, menurut hasil survey MSC (2019). Selain itu, peserta PKH dibantu untuk mendapatkan layanan tambahan tambahan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Keempat, pendidikan berkualitas tinggi: 78% anak penerima dana PKH bersekolah, dan sebagian besar dana PKH digunakan untuk kebutuhan sekolah, menurut data survei MSC tahun 2019.

Anak-anak penerima PKH juga didorong untuk berusaha. Kelima, adanya kesetaraan gender: seluruh penerima PKH adalah perempuan. Persentase siswa perempuan yang terdaftar di sekolah juga meningkat. Keenam, melalui Family Development System (FDS) atau sesi pengembangan kapasitas keluarga, PKH membantu penerima manfaat memahami pentingnya kebersihan diri dan lingkungan dalam kaitannya dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi Ketujuh, energi bersih dan murah. Selain bantuan finansial, nasabah PKH juga menerima subsidi energi listrik dan elpiji tiga kilogram. Penerima PKH bisa mendapatkan dan memanfaatkan LPG dan listrik dengan bantuan tambahan ini. Kedelapan, perluasan lapangan kerja dan ekonomi yang terhormat: penerima manfaat PKH menerima bantuan untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan pemasaran; mereka juga belajar tentang perencanaan keuangan dan perusahaan serta menerima pelatihan kewirausahaan. Infrastruktur, industri, dan inovasi menempati peringkat kesembilan.

Persyaratan paling krusial untuk menciptakan kebijakan dan program yang berhasil adalah ketersediaan data yang akurat. (Terru dkk., 2023). PKH telah menunjukkan kreativitas dalam mengalokasikan dana bantuan. Bantuan PKH kini diberikan tanpa memerlukan uang tunai. pengguna dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang cara kerjanya mirip dengan ATM. KKS merupakan karya inovatif yang awalnya dimanfaatkan oleh negara-negara yang menerapkan Bantuan Tunai Bersyarat menuntut mereka untuk menjembatani berbagai kepentingan, termasuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, skenario ini seringkali menimbulkan delemas, karena meskipun pendamping harus mampu mendukung kelangsungan program di lapangan, namun keadaan dan situasi sebenarnya seringkali menentukan sebaliknya. (Nandini dkk., 2022).

Peraturan Program Keluarga Harapan (PKH) dan peran Pendamping Sosial sebagai pelaksana program di lapangan menjadi sumber utama kendala atau pun hambatan pelaksanaan seperti program adanya di Desa pelabuan. Penyebab internal Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain, ketidaksesuaian data DTKS dengan keadaan KPM sebenarnya, ketidaktepatan distribusi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), permasalahan pendataan calon KPM PKH baru, dan berlarut-larutnya proses pemutakhiran data KPM. Beberapa hambatan dilapangan yang dialami oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya tersebut, membuat peran pendamping menjadi kurang maksimal atau kurang ideal. (Rachma dkk., 2022).

Berdasarkan pengamatan langsung yang penulis laksanakan tepatnya di desa Sukomulyo kecamatan Kaliwungu bahwa terdapat 10 KPM yang telah sejahtera dari adanya PKH. Adapun indikator sejahtera tersebut adalah pertama, anggota keluarga telah melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing - masing.

Kedua, alhamdulillah seluruh anggota yang mendapatkan PKH sudah tercukupi makan sehari tiga kali. Ketiga, anggota keluarga yang mendapatkan PKH pakaianya sudah bisa menyesuaikan pakaian antara di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian. Keempat, rumah yang dimiliki penerima PKH sebagian bukan lagi tanah, akan tetapi sudah berupa lantai kramik. Kelima, KPM telah mampu produktif berwirausaha dengan membuat usaha.

Warung usaha warung di rumah, dan wirausaha produk berdaya jual. Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan PKH dari adanya pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pengelolaan keuangan yang di sosialisasikan oleh pendamping PKH. Sehingga dengan adanya peran dan upaya pendamping PKH telah berhasil melahirkan masyarakat KPM yang sejahtera, dengan adanya kesadaran penuh masyarakat KPM seharusnya bisa mengalihkan atau bergantian ke masyarakat yang masih layak menerima atau yang lebih membutuhkan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis adanya peran pendamping PKH dalam mensejahterakan KPM dan upaya dalam mencapai SDGs Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu agar dapat mengetahui bagaimana peran pendamping PKH dalam mensejahterakan KPM dan upaya dalam mencapai SDGs Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai dari bulan April hingga Juni 2023. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 3 Keluarga Penerima PKH yang memiliki profil berbeda dan berupaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi wawancara mendalam juga dokumentasi.

Teknik analisis untuk instrumen wawancara dalam penelitian ini menggunakan Analysis Interactive Model terdiri dari data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusions (penarikan kesimpulan) (Matthew Miles & Michael Huberman., 1992).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pendamping PKH dalam mensejahterakan KPM di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan mempunyai peran yang penting dalam menjaga keluarga rentan di PKH. Pendamping berfungsi sebagai jembatan yang mempercepat perjalanan keluarga kembali menuju kesejahteraan dan memberi mereka akses terhadap sumber daya sosial yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, pendamping sosial adalah mereka yang bertugas bertindak sebagai agen perubahan untuk memperkuat sistem pendukung dan memanfaatkan sumber daya dan peluang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar.

a. Peran pendamping social sebagai fasilitator

Salah satu prosedur yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya peserta KPM PKH, adalah proses pendampingan. Dengan dukungan beberapa pihak, adanya usaha untuk membangun dan memberdayakan keluarga dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang sudah ada untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan. Pendamping berperan sebagai penyalur untuk membantu KPM mendapatkan dukungan yang mereka perlukan penyediaan prasarana pendukung di daerah yang sarana dan prasarananya masih belum memadai untuk upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas. (Zukri & Sagita, 2020) agar orang lain dapat memahaminya dengan baik dan mengikuti pedomannya.

Bahwa peran pendamping social dalam memberikan fasilitas bukan hanya untuk membantu menyelesaikan permasalahan penerima manfaat yang berupa kekeliruan terkait. Tetapi juga selain pendamping turut menyelesaikan masalah, Contohnya pendamping menjadi penghubung apabila ada masyarakat penerima manfaat yang memiliki UMKM atau usaha kecil lainnya untuk disalurkan dan dipasarkan ke sumber-sumber yang berikatan dengan usaha dari KPM tersebut. Ada juga misal butuh modal usaha atau pemasaran, pendamping bisa menghubungkan ke pihak usaha yang terkait guna membantu perekonomian KPM. Hasilnya masyarakat pemilik UMKM sejahtera karena bantuan promosi dari pendamping dan masyarakat KPM sukumulyo rata-rata sudah mandiri memiliki usaha sendiri. Industri kecil dan menengah banyak dijumpai di daerah pedesaan, dengan mengembangkan keterampilan diri serta

memanfaatkan potensi lokal, maka akan menghasilkan perubahan yang nyata. (Maghfiroh & Mulyono, 2021)

b. Peran pendamping sebagai pendidik

Peran pendidik atau peran edukatif adalah mengikut sertakan tenaga profesional untuk membantu merencanakan dan melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian melakukan penilaian dan memberikan nasehat serta pelatihan agar mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pada kenyataannya, gagasan ini dan premis dasar tentang tugas pendidik secara umumnya.

Tujuan utama program pendampingan adalah untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan menambah pengetahuan. Keluarga yang didukung diharapkan dapat berfungsi sebagai agen, menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari dari 98 kegiatan rutin bulanan. Pelatihan para pendamping diharapkan setidaknya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian KPM. Beberapa peran pendidik atau peran edukatif adalah mengikut sertakan tenaga profesional untuk membantu merencanakan dan melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian melakukan penilaian dan memberikan nasehat serta pelatihan agar mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pada kenyataannya, gagasan ini dan premis dasar tentang tugas pendidik secara umumnya.

Beberapa program pendampingan telah dilakukan. Salah satunya adalah pendampingan yang focus pada peningkatan status gizi balita. Bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping pada keluarga sasaran memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola makan dan pola asuh anak dengan memperhatikan latar belakang dari si ibu baik dari segi pendidikan, ekonomi, pengetahuan maupun kemampuan secara ekonomi. Hasilnya masyarakat sukumulyo berubah kearah lebih baik dalam pola asuh bagi anak yang mempunyai gizi buruk atau stunting sehingga kegiatan pendampingan memberikan manfaat bagi KPM. Hasilnya dari data desa tingkat stunting anak yang dahulu tinggi sekarang menjadi berkurang.

Setiap orang harus mampu menangani situasi sosial dan emosional dengan tepat, namun pendidik khususnya harus mampu membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. (Andini dkk., 2023) Selain itu, peran pendidik mencakup penyampaian informasi dan pengalaman kepada masyarakat mengenai topik-topik yang berhubungan dengan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemberian informasi ini biasanya sesuai dengan acara-acara lokal, yang menetapkan peran pendamping bagi pendidik dalam membantu masyarakat menerima pengetahuan yang lebih relevan.

Disisi lain sumber daya manusia strategi-strategi dalam memfasilitasi masyarakat juga harus diimplementasikan. (Irianto dkk., 2023) Jika strategi suatu program tidak dilaksanakan dengan tepat, kinerjanya akan tetap rendah, tidak peduli seberapa baik perencanaannya. Karena pelatihan yang diberikan oleh pendamping sangat diharapkan dapat membantu setidaknya dalam peningkatan perekonomian dari KPM itu sendiri.

c. Peran pendamping sebagai motivator

Pendamping PKH diharapkan mampu mengubah pola pikir penerima manfaat dengan menstimulasi, menyemangati, dan memotivasi keluarga penerima PKH dengan membuka diri lebih jauh. Tujuan dari latihan motivasi ini adalah untuk membuat peserta mempertimbangkan bagaimana memiliki seorang pendamping dapat membantu program yang sudah ada dan membantu menciptakan program baru. Selain itu, mereka juga menawarkan bantuan kepada peserta di beberapa program dan struktur KPM.

Keberhasilan dan keseimbangan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, yang berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi, dorongan untuk perbaikan diri, dan terwujudnya kesejahteraan sosial, bergantung pada keselarasan dan keberhasilan keduanya (Zulfikar dkk., 2023). Pendamping menghimbau agar para KPM meluangkan waktunya sebentar untuk mengikuti acara pertemuan secara bergantian di rumah warga penerima manfaat. Pendamping juga memberikan contoh tentang apa yang mereka sampaikan seperti agar kita sebagai orang tua memberikan contoh untuk anaknya agar shalat 5 waktu. Bukan untuk anaknya saja melainkan orang tua juga harus mencontohkannya.

Pendamping itu memotivasi KPM supaya terus berusaha contoh pada kategori ibu hamil dan balita untuk ibu hamil kita berikan motivasi untuk merutinkan ke puskesmas agar pertumbuhan anak baik karena semua biaya di cover oleh PKH selain itu juga pada pendidikan kita memberikan motivasi pada orang tua agar anak sekolah lebih rajin dan tekun yang telah dibiayai bantuan PKH tersebut, begitupun pada penyandang disabilitas dimana mereka ada pada usia muda dan tua bantuan PKH tersebut membantu mereka untuk makan, dan membantu lebih semangat dan lebih bahagia.

Hasilnya dari upaya pendamping berperan sebagai motivator KPM Desa Sukomulyo telah memikirkan jangka panjang pendidikan anak dimana keadaan yang seharusnya tidak mendukung tetapi orang tua mendukung anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang tinggi dengan mendaftarkan dan berhasil menjadi salah satu penerima beasiswa KIP kuliah. Hasil pendidikan yang buruk bagi perempuan dapat berdampak buruk terhadap hasil ekonomi dan sosial. (Bhuwania dkk., 2024) Dengan itu pendidikan menjadi gerbang utama dalam kesejahteraan harus benar-benar diperhatikan.

d. Peran pendamping sebagai mediator

Sebagai negara besar, Indonesia tentu menghadapi berbagai persoalan, salah satunya kemiskinan. Meskipun era kepemimpinan selalu berubah, kemiskinan masih merupakan tantangan besar. PKH adalah salah satu dari banyak inisiatif berkelanjutan yang digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Masih terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan yang menimbulkan perselisihan di dalam program. Kehadiran pihak ketiga yang tidak memihak selama mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam sebuah permasalahan, sebagai mediator telah melakukan beberapa upaya mediasi terhadap pihak yang bermasalah. Inti penting

adanya mediasi yaitu keinginan untuk segera menyelesaikan masalah bahwa peran pendamping sosial sebagai mediator yakni pendamping menjadi jembatan penghubung semua suara yang masuk antara KPM dengan masyarakat terkait konflik yang terjadi akibat masyarakat merasa KPM banyak yang salah sasaran. Selain itu, para pendamping sosial menangani masalah segera setelah masalah tersebut muncul dari berbagai masalah. Pendamping berupaya memediasi perselisihan tersebut dengan berusaha menyelesaikan permasalahan melalui mediasi.

Keterlibatan komunitas lokal dapat menciptakan dukungan lebih lanjut dan menciptakan dampak positif yang lebih luas. (Nurak dkk., 2023) Karena mediasi sangat menekankan pada bantuan pihak ketiga yang tidak memihak untuk memediasi perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka upaya mediasi diperkirakan dapat dibantu dengan meminta bantuan dari berbagai sumber.

Sumber tersebut dapat berupa Pemerintah Desa atau Kecamatan, pihak lain, atau rekan lain di bidang bantuan sosial agar membantu penyelesaian masalah. Titik penting dari mediasi adalah adanya keinginan untuk segera menyelesaikan dari pihak yang berkonflik. Seperti yang dipaparkan oleh narasumber KPM Desa Sukomulyo Sempat terjadi cekcok antar warga karena di anggap pilih kasih. Anggapan warga PKH hanya di dapatkan oleh kerabat desa maupun rt saja. Maka dari itu banyak sekali disini yang pada ngajuin buat di daftarkan jadi penerima PKH. Pendamping memberikan pengertian bahwa semua masyarakat yang kurang mampu berhak mendapat bantuan tersebut. Pendamping menegaskan siapapun yang merasa kurang mampu bisa mendaftarkan diri ke Pendamping agar di proses. Hasilnya dengan adanya kebijakan tersebut warga sekarang sudah damai dan tidak ada yang iri.

Tidak hanya itu, Adapun peran pendamping sebagai mediator seperti yang diutarakan KPM Desa Sukomulyo konflik bisa terjadi karena adanya kurang komunikasi antara pendamping sosial dengan KPM. Keluarga penerima manfaat terbagi menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah koordinasi dengan pendamping. Pertama kelompok anak sekolah (SD-SMA), kedua kelompok ibu hamil, ketiga kelompok anak usia dini dan yang terakhir kelompok lansia dan disabilitas. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai komponen tersebut maka tidak bisa menerima bantuan PKH. Tetapi masih banyak warga masyarakat yang tidak memahami aturan tersebut yang menjadikan ada kecemburuan sosial dari warga miskin yang tidak mempunyai komponen yang ada di aturan Program Keluarga Harapan.

Pendamping telah memberikan upaya mediasi dan menjelaskan seharusnya pada konflik yang terjadi saat melakukan pertemuan, dan hasilnya masyarakat Desa Sukomulyo telah memahami dan menyadari bahwa pemberian bantuan social tidak dipilih sesuai kriteria RTnya tetapi ada komponen sendiri dan ada pertimbangan dari beberapa pemerintah daerah seperti Dinas Sosial.

**Upaya dan Hasil Pendamping PKH dalam mencapai SDGs di
Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan**

Pembinaan untuk mencapai tujuan yang dipilih akan diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa Sukomulyo memilih Desa Tanpa Kesenjangan (Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Pendidikan berkualitas, dan Desa berkesetaraan gender) sebagai salah satu SDGs Desa yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Implementasi atau upaya yang dilakukan oleh Desa Sukomulyo salah satunya mengupayakan masyarakat ikut serta melalui program PKH tanpa adanya kesenjangan social didalamnya, jadi untuk program PKH sendiri terdapat peran pendamping PKH guna mendampingi KPM. Sehingga masyarakat nantinya akan selalu diarahkan dengan berbagai kegiatan guna KPM bisa produktif, sehingga tidak hanya mengandalkan pemberian dari pemerintah. Dengan demikian pemangku desa dan warga terus berusaha mencapai keberhasilan SDGs Desa yang dipilih.

Dimana peran pendamping dalam penelitian ini akan diperhatikan penuh guna keberhasilan SDGs Desa Sukomulyo sehingga mungkin lebih mudah untuk melihat tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembangunan dan mengetahui cara terbaik menggunakan dana masyarakat untuk mendukung upaya tersebut. Selain itu pendamping PKH (Pekerja social) juga harus didukung dengan faktor pendukung terdiri dari motivasi, dukungan lingkungan, sarana dan prasarana itu sendiri. (Riyana & Kisworo, 2019) Begitu juga harus didukung dengan masyarakat Desa Sukomulyo berupa Faktor pendukung pengelolaan program yang dijalankan yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya SDGs Desa, sarana dan prasarana, pembinaan, serta pendanaan yang disalurkan dari pemerintah kepada KPM. (Anggraeni & Kisworo, 2020)

Adanya bantuan PKH, peran pendamping telah melakukan upaya untuk mencapai SDGs Desa secara kesinambungan dan menghasilkan Masyarakat yang Sejahtera aman dan damai. Dari beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan salah satunya Desa Tanpa Kesenjangan (Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Pendidikan berkualitas, dan Desa berkesetaraan gender)

a. Tanpa kemiskinan

Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi umat manusia adalah pemberantasan kemiskinan dalam segala manifestasinya. Rendahnya perekonomian masyarakat di Indonesia menjadi salah satu faktor utama Pemerintah membangun dan mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun wirausaha salah satu contohnya yaitu Home Industri dan UMKM. (Evitasari & Kisworo, 2020) Meskipun terjadi penurunan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tetapi masih banyak orang yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. SDGs mewakili janji berani untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan memberantas kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya pada tahun 2030.

Pendamping telah menjalankan peran serta tugasnya sebagai pendamping sosial dalam Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat/SDGs dimana dapat dilihat bahwa dengan adanya program PKH didukung dengan peran pendamping sebagai Pendidik mampu membantu perekonomian para KPM dari yang sebelumnya tidak berpenghasilan menjadi mempunyai penghasilan dari usaha sampingan.

Adanya beberapa pelatihan dari pendamping peserta sadar untuk berpartisipasi serta mengetahui akan pentingnya usaha contohnya dengan memanfaatkan potensi alam yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan juga produk olahan lainnya. Sehingga disarankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat produk dengan mengedepankan inovasi guna mempunyai nilai jual. (Arbarini dkk., 2022). Keberlangsungan suatu kelompok juga ditentukan adanya peran kepemimpinan. Apabila pemimpin yang memimpin kelompok tersebut memiliki peran yang baik maka keberlangsungan dari kelompok tersebut juga akan baik dan lama. (Roviana & Malik, 2022). Hasilnya masyarakat lebih mandiri, 10 KPM Desa Sukomulyo terbukti mampu mendirikan usaha rumahan dengan inovasinya sendiri, KPM telah berpikir jangka panjang bahwa mereka percaya pada dirinya dan mampu menghidupi keluarganya.

b. Tanpa kelaparan

Bantuan sosial telah digunakan sesuai haknya, dan program SDGs telah berupaya untuk memberantas semua jenis kelaparan dan kekurangan gizi serta menjamin bahwa setiap orang, terutama anak-anak, memiliki akses terhadap pangan yang cukup sepanjang tahun. Untuk mencapai hal ini, pertanian berkelanjutan harus dipromosikan, petani skala kecil harus dibantu, teknologi dan pasar harus diakses, dan kolaborasi internasional diperlukan untuk menjamin investasi infrastruktur dan teknologi yang akan meningkatkan produksi pertanian.

Pada peran pendamping PKH sebagai fasilitator telah memberikan upaya kepada KPM Desa Sukomulyo, seperti yang dituturkan salah satu warga desa sukumulyo : Setiap sebulan sekali KPM mendapatkan bahan pangan dari PKH berupa beras 5 kg, kacang hijau, telur 1 kg, sayuran seperti kentang atau jipang, dan buah-buahan seperti jeruk, pir, atau apel. Pengambilanya melalui agen khusus yang memang sudah ditugaskan. cara pengambilanya yaitu KPM datang langsung ke lokasi pengambilan dengan membawa kartu KKS (kartu keluarga Sejahtera) kemudian mengisi formulir sesuai desa masing-masing. Kemudian menunggu antrian pengambilan.

Begitu juga saling berkaitan dengan adanya bantuan social (PKH) Jalur gizi dan kesehatan yang memungkinkan program bantuan sosial meningkatkan hasil kelahiran, begitu pada bantuan tunai dan bantuan pangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga dan, akibatnya, pola makan dan status gizi perempuan baik (Leroy dkk., 2021). Dan pendamping telah berupaya melaksanakan perannya sebagai fasilitator KPM Desa Sukomulyo dengan mencapai kesejahteraan masyarakat/SDGs dalam hal desa tanpa kelaparan dimana dapat dilihat bahwa dengan adanya program bantuan pemberian bahan pangan berupa beras lauk dan sayuran setiap satu bulan sekali guna memenuhi kebutuhan gizi terutama gizi anak-anak yang perlu diperhatikan agar anak balita (ibu hamil) tidak terjadi stunting.

c. Pendidikan berkualitas

Salah satu cara yang paling efektif dan teruji untuk mendorong pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan gender dan kekayaan, menyediakan akses yang setara

terhadap pelatihan kejuruan yang murah, dan akses universal terhadap pendidikan tinggi berkualitas tinggi. Bahwa kemampuan dari aspek perubahan pengetahuan, pemahaman, perubahan tingkah laku, dan tindakan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.(Malik dkk., 2021) Suatu negara dikatakan maju atau berkembang apabila pembangunan di bidang pendidikan diberi perhatian secara maksimal dengan upaya penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mumpuni untuk pendidikan masyarakatnya.(Ananda & Shofwan, 2023)

Pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai sasaran sangat bermanfaat dan membantu bagi masyarakat yang mengharapkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya tentu akses pendidikan yang merata dan adil. Salah satu KPM warga desa sukumulyo telah ikut berbahagia karena mendapatkan keringanan sekolah anaknya yang seharusnya mereka tidak mampu untuk bersekolah, tetapi dengan adanya bantuan PKH tersebut warga Sukomulyo sangat terbantu adanya uang yang diberikan dari PKH Perbulan sesuai tingkatan sekolah, uang tersebut digunakan untuk membayar SPP, membeli buku, seragam, tas, sepatu dan keperluan sekolah lainnya.

Pendidikan adalah bagian utama dan bukan pekerjaan (Nichols, 2024). Dimana peran pendidik (pendamping) meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya mengenai proses belajarnya. Pendidik yang kreatif sangat berpengaruh terhadap peserta didiknya.(Trisnawati dkk., 2021). Dukungan kaum muda dari mentor alami mempunyai potensi untuk memfasilitasi keberhasilan mereka dalam transisi menuju kemandirian meskipun mereka pernah mengalami kesulitan sebelumnya.(Sulimani-Aidan & Tayri-Schwartz, 2021). Pendamping telah mencapai SDGs berupa Pendidikan yang berkualitas, adil dan efektif, dilihat dari anggota KPM yang menggunakan uang bantuan PKH untuk membayar Pendidikan anak. Maka kebutuhan Pendidikan sekolah anak tercukupi dan anak mendapat Pendidikan yang sesuai sebagaimana mestinya program pemerintah wajib sekolah 12 tahun sehingga tercipta adil dan efektif.

d. Desa berkesetaraan gender

Perbedaan jenis laki-laki dan perempuan dinamakan gender berdasarkan budaya. laki-laki dan perempuan dikategorikan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, yang dibentuk oleh adat dan tradisi di berbagai komunitas mereka. Selain sebagai hak asasi manusia, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan juga diperlukan demi masa depan yang berkelanjutan karena pemberdayaan perempuan dan anak perempuan telah terbukti mendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi. Pekerjaan sosial juga mewujudkan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan dan keadilan sosial, serta investasi besar dalam melibatkan dan memperkuat perspektif dan prioritas orang-orang yang dilayaninya.(Kemp, 2023)

Peran pendamping dalam Upaya meningkatkan SDGs berupa kesetaraan gender di Desa Sukumulyo berfokus pada persamaan hak, tugas dan kewajiban antara laki-laki (suami) dengan Perempuan (istri). Salah satunya warga Sukomulyo seorang bapak lansia yang sudah ditinggal keluarganya beliau hidup sendiri, bapak itu telah

mendapatkan haknya menerima bantuan social, maka penerimaan bantuan social tidak hanya perempuan (ibu-ibu) saja yang mendapatkan melainkan seorang laki-laki juga berhak mendapatkan haknya menerima PKH.

Dengan adanya PKH diharapkan dalam keluarga mampu memunculkan kepekaan bahwa terdapat diskriminasi peran di dalam rumah tangga kepada perempuan dan laki-laki. Di dalam program PKH terdapat proses penyadaran kepada pihak perempuan maupun laki-laki bahwa kewajiban dan tanggung jawab pada tugas-tugas domestik merupakan tugas dan kewajiban bersama. Upaya ini dilakukan untuk memunculkan kesadaran bersama antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen rumah tangga

4. SIMPULAN DAN SARAN

Peran pendamping PKH dalam mensejahterakan KPM di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan

Peran pendamping PKH sangat dibutuhkan ditengah keadaan Masyarakat penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan fasilitas, pendidik, motivator juga mediator karena peran pendamping menjadi garda depan guna menyalurkan semua kepada masyarakat penerima PKH sesuai tugas, tanggung jawab, dan peran yang dijalankan. Agar masyarakat penerima manfaat (KPM) tidak hanya bergantung pada pemerintah. Untuk melihat hasil dari semua peran pendamping PKH yang dilakukan ditentukan dari pendamping Desa itu sendiri. Di Desa Sukomulyo peran pendamping telah berhasil mengantarkan masyarakatnya ke jenjang kehidupan yang lebih baik dengan hasil adanya usaha rumahan yang dikelola oleh 10 keluarga penerima manfaat itu sendiri dan beberapa arahan serta solusi lainnya.

Upaya dan Hasil Pendamping PKH dalam mencapai SDGs di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pendamping PKH Desa Sukomulyo telah berhasil mewujudkan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan salah satunya Desa Tanpa Kesenjangan. Dimana dengan adanya bantuan PKH peran pendamping yang mempunyai tugas, tanggung jawab, serta peran telah semaksimal mungkin memberikan fasilitas, dan berperan sebagai pendidik, motivator juga mediator. Di dalam prosesnya menghasilkan Masyarakat yang memahami pemberian informasi, komunikasi yang bagus, koordinasi yang baik berhasil menjadikan Masyarakat Desa Sukomulyo menjadi desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, menempuh Pendidikan yang berkualitas, dan desa dengan kesetaraan gender.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ketua Pendamping PKH Desa Sukomulyo Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, T. A., & Shofwan, I. (2023). Peran Tutor Dalam Layanan Pembelajaran Komputer Di Lembaga Kursus Pelatihan Elmuna Klirong Kebumen. *Jendela Pls: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.37058/Jpls.V8i2.7620>
- Andini, F., Waspada, I., Budiwati, N., & Susanto, S. (2023). Peran Guru Dengan Kompetensi Sosial Emosional Dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Untuk Membangun Student Well-Being Pada Sekolah Menengah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i1.1490>
- Anggraeni, D., & Kisworo, B. (2020). Pengelolaan Program Kesehatan Masyarakat Melalui Forum Kesehatan Kelurahan Siaga Di Kelurahan Plalangan. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 23-39. <https://doi.org/10.15294/jnece.V4i1.34292>
- Arbarini, M., Ilyas, I., Kisworo, B., Malik, A., & Siswanto, Y. (2022). Pelatihan Ecoprinting Berbasis Participatory Learning And Action Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.37905/Dikmas.2.3.857-866.2022>
- Bhuwania, P., Mukherji, A., & Swaminathan, H. (2024). Women's Education Through Empowerment: Evidence From A Community-Based Program. *World Development Perspectives*, 33, 100568. <https://doi.org/10.1016/J.Wdp.2024.100568>
- Buchs, M. (2021). Sustainable Welfare: Independence Between Growth And Welfare Has To Go Both Ways. *Global Social Policy*, 21, 146801812110191. <https://doi.org/10.1177/14680181211019153>
- Burhanuddin, B., Arfiani, A., Mustaking, M., & Prasodjo, T. (2023). Strategy For Achieving Integrity Zone At Makassar Vocational Training And Productivity Center. *Sosiohumaniora*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V25i2.46217>
- Dr. Suwandi, Dr. R. A. (2014). *Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota Ikapi 077/Diy.*
- Elisah, Y. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Fasilitas Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Kota Cilegon* [Masterthesis, Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62004>
- Evitasari, R. Y., & Kisworo, B. (2020). Wirausaha Home Industri Mebel Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30870/E-Plus.V5i1.8095>

- Herdiyanti, H., & Akbar, M. F. (2020). The Analysis Of Socio-Economic Characteristic Impacts On Child Education In Rural Households. *Sosiohumaniora*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V22i1.24064>
- Hubaib, F. (2020). Analysis Of Equality In Social, Economic And Education In Enggelam Village Muara Wis , District Of Kutai Kartanegara. *Sosiohumaniora*, 22(3), Article 3. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V22i3.26287>
- Irianto, H., Kurniawan, B. A., & Khamdi, A. S. A. H. (2023). Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Suko, Sukodono, Sidoarjo. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1822>
- Jusrianto, J. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pendukung Sekretaris Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Bidang Administrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V3i2.285>
- Kemp, S. P. (2023). Building Jetties To The Future: Thinking And Doing Social Work In A 'Moment Of Danger.' *Social Work & Society*, 21(1), Article 1. <https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/sws/article/view/836>
- Kibukho, K. (2021). Mediating Role Of Citizen Empowerment In The Relationship Between Participatory Monitoring And Evaluation And Social Sustainability. *Evaluation And Program Planning*, 85, 101911. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101911>
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan Dan Pengendalian. Program Pembangunan*. Universitas Indonesia.
- Leroy, J. L., Koch, B., Roy, S., Gilligan, D., & Ruel, M. (2021). Social Assistance Programs And Birth Outcomes: A Systematic Review And Assessment Of Nutrition And Health Pathways. *The Journal Of Nutrition*, 151(12), 3841–3855. <https://doi.org/10.1093/jn/nxab292>
- Lestari, T. S., & Suminar, T. (2020). Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal Di Desa Menari Tanon. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 1–16. <https://doi.org/10.15294/jnece.V4i1.34481>
- Lorts, C., Tasevska, N., Adams, M. A., Yedidia, M. J., Tulloch, D., Hooker, S. P., & Ohri-Vachaspati, P. (2019). Participation In The Supplemental Nutrition Assistance Program And Dietary Behaviors: Role Of Community Food Environment. *Journal Of The Academy Of Nutrition And Dietetics*, 119(6), 934-943.E2. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.11.021>
- Maghfiroh, F. W., & Mulyono, S. E. (2021). Pengembangan Kewirausahaan Dalam Pembuatan Kitiran Pada Kpk Mekar Jaya Di Desa Karanganyar Kabupaten Jepara. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1),

Article 1. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/e-plus/article/view/11419>

Malik, A., Utsman, U., Mulyono, S. E., Arbarini, M., & Desmawati, L. (2021). Sosialisasi Seribu Hari Pertama Kehidupan Untuk Generasi Berkualitas Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Bina Desa*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/jbd.v3i1.27072>

Matthew Miles, & Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.

Menashy, F., & Zakharia, Z. (2023). Partnerships For Education In Emergencies: The Intersecting Promises And Challenges Of Sdg 4 And Sdg 17. *International Journal Of Educational Development*, 103, 102934. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102934>

Mulyono, S. E. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Edukasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.964>

Nakhle, P., Stamos, I., Proietti, P., & Siragusa, A. (2024). Environmental Monitoring In European Regions Using The Sustainable Development Goals (Sdg) Framework. *Environmental And Sustainability Indicators*, 21, 100332. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100332>

Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>

Nichols, C. (2024). Equity And Empowerment Effects: Multiple Styles Of 'Voluntarism' In Community-Based Health Projects. *World Development*, 174, 106448. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106448>

Nurak, A. P. N., Dewi, A. A. I. K. G., & Dewi, K. G. P. (2023). Perubahan Sosial Pada Paguyuban Pedagang Paska Revitalisasi Pasar Seni Sukawati. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2024>

Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5457>

Ridena, S. (2021). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Perdesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>

- Riyana, D., & Kisworo, B. (2019). Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Margo Laras Pati. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 79-87.
<https://doi.org/10.15294/jnece.v3i1.26515>
- Roviana, R., & Malik, A. (2022). Dinamika Kelompok Pengusaha Warung Sate Ayam Khas Ambal Dalam Upaya Meningkatkan Taraf Hidup. *Jendela Pls: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37058/jpls.v7i2.5669>
- Sulimani-Aidan, Y., & Tayri-Schwartz, T. (2021). The Role Of Natural Mentoring And Sense Of Belonging In Enhancing Resilience Among Youth In Care. *Children And Youth Services Review*, 120, 105773.
<https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2020.105773>
- Terru, I., Kurniawan, B. A., & Ismail, I. (2023). Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1639>
- Trisnawati, W., Raharjo, T. J., & Kisworo, B. (2021). Peran Pendidik Dalam Mengembangkan Kreativitas Seni Anak Usia Dini Di Kelompok Bermain Koronka Bawen Kabupaten Semarang. *Jendela Pls: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.2309>
- Zukri, Z., & Sagita, M. (2020). Analisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (Dpmg) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.295>
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Marjani, N. (2023). Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1556>